

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

XYZ menjadi kabupaten terluas di Jawa yang memiliki area luasnya sama dengan 34 kali luas Bandung, 17 kali luas Surabaya, bahkan 9 kali luas Jakarta. Kabupaten XYZ terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Jarak desa terjauh dari pusat kota XYZ mencapai +100 km dengan waktu tempuh lebih dari 3 jam melewati hutan dan sungai. Kabupaten XYZ memiliki jumlah penduduk yang banyak sebesar 1,7 juta jiwa dengan latar belakang masyarakat yang majemuk. Karakteristik dan keragaman yang dimiliki oleh Kabupaten XYZ memberikan peluang pengembangan pembangunan di Kabupaten XYZ, salah satunya dalam menciptakan budaya digital baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat [1].

Di tengah era industri 4.0 saat ini, kebutuhan transformasi digital menjadi sangat penting dalam mengubah pandangan fundamental terhadap proses bisnis pemerintahan. Sistem informasi telah menyatukan dunia, menciptakan keterhubungan dan interaksi yang lebih erat, serta menghapus batasan geografis. Hal ini membuka peluang baru bagi pemerintah untuk berkembang dan bersaing secara global. Teknologi dan digitalisasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan publik. Berikut merupakan data Survei Indeks Pengembangan *e-Government* (EGDI) tahun 2022 yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tabel 1.1. Survei Indeks Pengembangan *e-Government* (EGDI) [2]

Negara	Rank 2022	EGDI 2022
Denmark	1	0.9717
Finlandia	2	0.9533
Korea Selatan	3	0.9529
Singapura	12	0.9133
Malaysia	53	0.7740

Negara	Rank 2022	EGDI 2022
Thailand	55	0.7660
Brunei Darussalam	68	0.7270
Indonesia	77	0.7160
Vietnam	86	0.6787
Filipina	89	0.6523

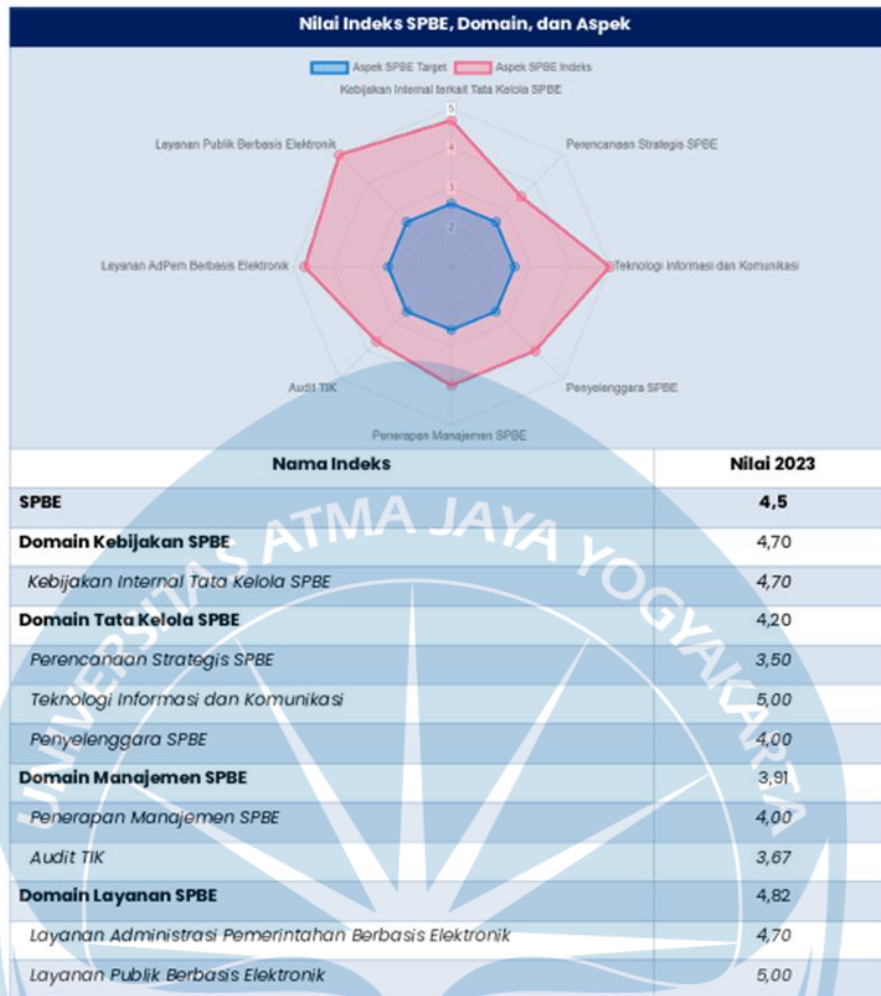
Posisi Denmark terbukti menjadi negara yang menduduki peringkat teratas dalam indeks *e-Government* berdasarkan penilaian di tahun 2022. Indeks *e-Government* yang tinggi ini memiliki dampak positif pada berbagai aspek pelayanan lainnya. Sementara Indonesia meraih skor sebesar 0.7160 dan menempati peringkat 77 dari 193 negara di seluruh dunia. Indeks *e-government* Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan menempati urutan 107 di tahun 2018 [3].

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini menegaskan tentang tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mempercepat penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari administrasi *internal* hingga pelayanan publik. SPBE sebagai mandatori bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah menjawab tantangan dalam melakukan transformasi digital untuk memberikan layanan bagi masyarakat sipil [4].

SPBE di lingkup pemerintahan memungkinkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek layanan untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan. Implementasi SPBE diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan untuk mewujudkan transparansi yang lebih besar, partisipasi publik yang lebih besar, dan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah. Melalui portal pemerintah elektronik, masyarakat bisa memperoleh informasi seputar kebijakan, program pembangunan, dan anggaran pemerintah. Masyarakat juga bisa memberikan umpan balik, saran, dan pengaduan melalui platform elektronik, yang meningkatkan relasi antara pemerintah dan masyarakat [5].

Pemerintah Kabupaten XYZ tengah mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan SPBE untuk mengatasi tantangan era digital dan meningkatkan pelayanan publik. Evaluasi kebijakan ini diukur melalui Indeks SPBE sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Penilaian ini memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana implementasi SPBE telah berjalan di setiap instansi pemerintah. Tujuan implementasi SPBE terdiri dari tiga hal utama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu [6].

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2023, Pemerintah Kabupaten XYZ memperoleh nilai SPBE paling tinggi di tingkat Pemerintah Daerah dengan indeks 4,50 dari skala 1-5 dan mendapat predikat yang memuaskan [7]. Nilai ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0.97 dari indeks SPBE Kabupaten XYZ di tahun 2021 yaitu sebesar 3.53 dengan predikat sangat baik [8]. Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten XYZ mendapat penghargaan *Digital Government Award* pada tahun 2023. Merujuk pada nilai pada 1 gambar 1.1 di bawah, penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten XYZ sudah optimal pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.



Gambar 1.1. Indeks SPBE Kabupaten XYZ 2023 [9]

SPBE XYZ mendapat indeks yang memuaskan dikarenakan telah melakukan digitalisasi pada berbagai layanan yang ada. Hal ini dikarenakan di masing-masing perangkat daerah memiliki semangat dalam menghadirkan inovasi yang menciptakan banyaknya aplikasi. Akan tetapi, dari digitalisasi yg telah dilakukan timbul masalah baru yakni masyarakat harus mengakses banyak aplikasi yang berjumlah ±87 aplikasi untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh masing-masing perangkat daerah. Atas dasar hal ini, Pemerintah Kabupaten XYZ berinisiatif untuk mengembangkan sebuah portal layanan publik yang dapat menghadirkan berbagai layanan publik dalam sebuah Portal Layanan Publik. Portal layanan publik ini dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan memanfaatkan konsep *single sign on* dimana seluruh layanan publik dapat diakses dalam sebuah platform.

Pengembangan portal layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten XYZ harus mendukung efisiensi proses bisnis yang ada. Dalam hal ini, pemerintah dapat meningkatkan pemanfaatan TIK untuk mengatasi kendala dalam struktur birokrasi, serta merancang sistem manajemen dan alur kerja yang memungkinkan lembaga pemerintah bekerja secara terintegrasi untuk menyederhanakan akses terhadap semua informasi dan layanan publik yang diperlukan untuk mencapai tata kelola yang efektif [10]. Langkah ini diharapkan memungkinkan pengembangan *e-government* dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi, sehingga sumber dayanya dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya.

Enterprise architecture perlu disusun secara jelas dan terperinci sehingga dapat menjadi dokumen pokok dalam pengembangan sistem secara berkelanjutan. Sebagai *living document*, perancangan EA ini bukan hanya dokumentasi statis, tetapi juga menjadi panduan dinamis yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan bisnis. Hal ini memungkinkan portal layanan publik untuk terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pengguna, sehingga menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terkini di Kabupaten XYZ.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu terkait digitalisasi di Pemerintah Kabupaten XYZ yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan masyarakat ketika ingin mendapatkan berbagai layanan publik harus mengakses berbagai aplikasi dan juga harus menginputkan data yang sama berulang kali ke dalam dua aplikasi yang berbeda. Sehingga kedepan dibutuhkan EA untuk pengembangan portal layanan publik yang responsif dan terintegrasi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana merancang *enterprise architecture* untuk

menunjang pengembangan portal layanan publik yang terintegrasi di Pemerintah Kabupaten XYZ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk menciptakan *blueprint* atau desain rinci struktur dan komponen *enterprise architecture* yang sesuai dengan kebutuhan layanan publik di Pemerintah Kabupaten XYZ.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian dibutuhkan agar penelitian lebih berfokus pada bidang atau fungsi bisnis tertentu supaya tidak meluas dari pembahasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, batasan penelitian ini adalah:

1. Analisis desain *enterprise architecture* dilakukan untuk lingkup pengembangan portal layanan publik.
2. Perancangan *enterprise architecture* ini hanya mencakup layanan publik atau pelayanan yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten XYZ untuk warga Kabupaten XYZ.
3. Fase TOGAF yang digunakan dalam rancangan portal layanan publik ini mencakup fase *preliminary*, *architecture vision*, *business architecture*, *information system architecture*, *technology architecture*, dan *opportunities and solution*. Penelitian ini tidak menggunakan fase *migration planning*, *implementation governance*, dan *architecture change management*.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi pada tiga hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten XYZ

Dengan adanya perancangan enterprise architecture dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat diterapkan hingga ke tahap pengembangan aplikasi.

2. Bagi Penulis

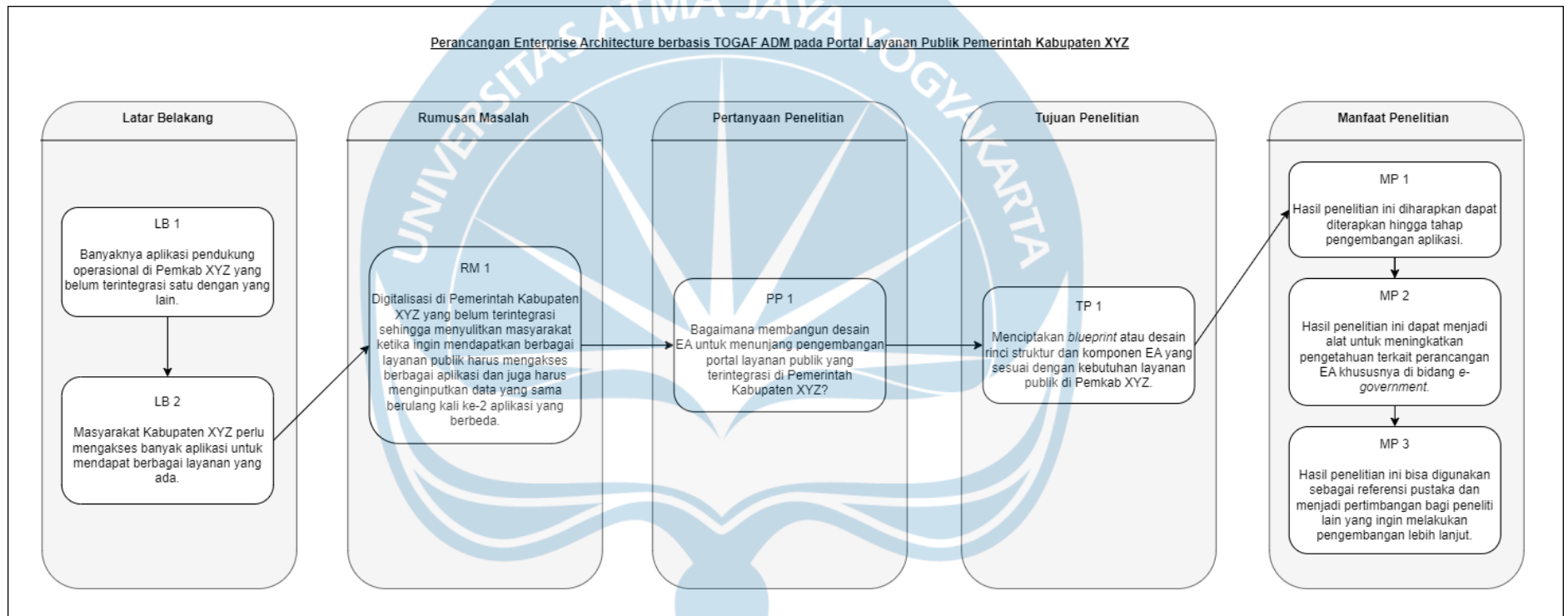
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait perancangan *enterprise architecture* khususnya di bidang *e-government*.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi literatur pustaka dan menjadi pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengembangan lebih lanjut.

1.7. Bagan Keterkaitan

Penelitian ini memiliki bagan keterkaitan seperti pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2. Bagan Keterikatan